

DAMPAK KOMPETENSI PROFESIONAL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA APARATUR DI DINAS PENDIDIKAN <i>Ismiyati , Hendri Dunan dan Eni Yuliati</i>	1-15
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN PROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK PADA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL <i>Mitha Clarita Rani , Defrizal dan Tika Oktavia</i>	16-27
DETERMINAN BEBAN KERJA DAN KEJENUHAN KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DI LINGKUNGAN LAYANAN KESEHATAN <i>Doni Andika Sitepu , Ni Putu Widhia Rahayu dan Ria Apriyani</i>	28-39
TRANSFORMASI DIGITAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEIMBANGAN KEHIDUPAN KERJA KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF FENOMENOLOGIS <i>Dina Lestari Yuliati , Wenny Permata Sari dan Muhammad Zefri</i>	40-48
MODEL PENGARUH KUALITAS KINERJA APARATUR DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENGELOLAAN ASET PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF <i>Dwi Utari Ningsih , Tri Lestira P Warganegara dan Ahmad Tri Wibowo</i>	49-61
MODEL PENGUATAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS PENGEMBANGAN KARIR, MOTIVASI, DAN KOMPETENSI DALAM SEKTOR PEMERINTAHAN <i>Yuli Arieani , M.Oktaviannur dan Rahmadani</i>	62-75
EKSPLORASI FAKTOR PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PREFERENSI DAN KEPUTUSAN PEMBELIAN BENIH JAGUNG NK <i>Kenedhy Kinsyafman , Andala Rama Putra Barusman dan merina Adam</i>	76-93
REKONSTRUKSI STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI MODERN <i>Kiki Sanakri , Agus Wahyudi dan Desi Susanti</i>	94-103
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA IBU BEKERJA DI DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG <i>Dewi Restalia , Haninun dan Ahmad Nabil Zam Zam</i>	104-116
DINAMIKA LINGKUNGAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA DALAM MEMBENTUK KOMITMEN ORGANISASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA <i>Siska Septiani Putri , Tina Miniawati V.Barusman dan Nurichsan</i>	117-131

Jurnal Manajemen Visionist	Volume 14	Nomor 1	Hal 1– 131	Bandar Lampung Maret 2025	ISSN 1411 – 4186
-------------------------------	-----------	---------	---------------	------------------------------	---------------------

ISSN 1411 – 4186

Jurnal Manajemen

Visionist

Volume 14, Nomor 1 – Maret 2025

DEWAN PENYUNTING

Peninjau (Reviewer)

Anggalia Wibasuri
Angga Febrian
Winda Rika Lestari
Yateno
Ismaul Fitroh
Ahmad Dzul Ilmi Syariffudin
Sekar Wulan Prasetyaningtyas
Abdullah Muksin
Fera Nefianti
Dwi Rorin Maulidin Insana

Penyunting Pelaksana

Yanuaris Yanu Dharmawan
Nova Alvia

Alamat: Jl.
Z.A. Pagar Alam No. 89, Bandar Lampung Tel.
0721- 789825; Fax. 0721 - 770261
Email: visionist@ubl.ac.id

Diterbitkan oleh:
Program Studi Manajemen (S2)
Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

Model Pengaruh Kualitas Kinerja Aparatur dan Kepemimpinan terhadap Pengelolaan Aset Pemerintahan Daerah yang Efektif

Dwi Utari Ningsih¹, Tri Lestira Putri Warganegara², Ahmad Ari Wibowo³

^{1,2,3} Universitas Bandar Lampung

Corresponding e-mail: tira@ubl.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas kerja aparatur serta komitmen pimpinan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, seluruh barang yang diperoleh melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber perolehan lain yang sah dikategorikan sebagai Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, pengelolaan BMD harus dilaksanakan secara akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis. Namun dalam praktiknya, pengelolaan aset daerah di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah permasalahan. Temuan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan masih adanya aset daerah yang belum tercatat secara optimal, hilang, rusak, berpindah tangan, maupun tidak dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan beberapa aset seperti tanah dan bangunan dibiarkan terbengkalai sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak dan dapat menimbulkan persoalan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran kualitas kinerja aparatur serta komitmen pimpinan dalam mendukung pengelolaan aset daerah yang lebih baik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik sensus, di mana seluruh anggota populasi yang berjumlah 92 orang dijadikan sebagai responden. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden serta didukung oleh dokumentasi resmi yang diperoleh dari BPKAD. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26 melalui beberapa tahapan, meliputi pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, analisis deskriptif untuk menggambarkan data, serta analisis regresi linier berganda guna mengetahui hubungan antar variabel. Selain itu, dilakukan pula pengujian asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas sebagai syarat kelayakan model penelitian. Dalam rangka menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu, uji simultan (uji F) untuk melihat pengaruh secara bersama-sama, serta analisis koefisien determinasi guna mengukur besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas kerja aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu, komitmen pimpinan juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset daerah. Secara simultan, kedua variabel tersebut memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas kinerja aparatur yang didukung oleh komitmen pimpinan yang kuat akan mampu mendorong terciptanya pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMD, antara lain melalui pengembangan kompetensi dan profesionalisme aparatur secara berkelanjutan melalui program pelatihan, penguatan budaya kerja yang menekankan pada kinerja dan akuntabilitas, peningkatan komitmen pimpinan dalam menciptakan tata kelola aset yang transparan, serta penguatan kebijakan dan sistem pengawasan. Selain itu, penerapan strategi manajerial yang mampu mengintegrasikan peran aparatur dan pimpinan, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi antarunit kerja juga menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kata Kunci: Kualitas Kerja Aparatur, Komitmen Pimpinan, Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pendahuluan

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu sumber daya strategis yang dimiliki pemerintah daerah dan memiliki peran penting dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan daerah (Belo & Asnawai, 2018). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, aset daerah tidak hanya dipandang sebagai sarana operasional pemerintahan, tetapi juga sebagai komponen penting yang dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintahan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah. Berdasarkan ketentuan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, barang milik daerah adalah seluruh barang yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber perolehan lain yang sah. Oleh karena itu, pengelolaan BMD harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis agar mampu memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sayoga & Yudianto, 2023).

Pengelolaan aset daerah yang baik merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Manajemen aset yang dilakukan secara sistematis dan profesional diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nohi, 2025). Dalam praktiknya, pengelolaan BMD harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Implementasi kebijakan tersebut menuntut adanya aparatur yang memiliki kompetensi memadai serta dukungan komitmen pimpinan yang kuat agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan secara optimal (Novita, 2025).

Meskipun berbagai regulasi telah ditetapkan, permasalahan terkait pengelolaan aset daerah masih sering ditemukan di berbagai pemerintah daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaannya secara berkala masih menemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, seperti ketidaksesuaian pencatatan aset, aset yang tidak diketahui keberadaannya, serta aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan aset daerah di sejumlah pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek administrasi, pengawasan, maupun kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaannya (Setiyadi & Wartini, 2016).

Temuan audit BPK pada tahun 2023 menunjukkan adanya berbagai permasalahan terkait pengelolaan aset tetap pada sejumlah pemerintah daerah. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain pencatatan aset yang belum dilakukan secara memadai, penyajian nilai aset yang tidak wajar, serta ketidaksesuaian antara data aset dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, terdapat pula aset berupa tanah, peralatan dan mesin, bangunan, serta infrastruktur yang tidak diketahui keberadaannya atau dicatat secara tidak lengkap dalam sistem administrasi aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah masih memerlukan perbaikan dalam hal sistem pencatatan, pengendalian internal, serta penerapan kebijakan akuntansi yang tepat (Ishak *et al.*, 2022).

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2024, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan aset daerah, di antaranya pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin yang belum memadai pada Sekretariat DPRD, ketidaksesuaian data ruas jalan dengan kartu inventaris barang, serta pengelolaan belanja modal peralatan dan mesin pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal penatausahaan dan pengawasan aset.

Berbagai permasalahan tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah kualitas aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah. Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, serta profesionalisme yang tinggi diyakini mampu menjalankan tugas pengelolaan aset secara lebih efektif dan akuntabel. Selain itu, keberhasilan pengelolaan BMD juga sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam memberikan arahan, dukungan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset di lingkungan organisasi perangkat daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, BPKAD memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi serta penataan program kerja di bidang pengelolaan aset daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan, serta pengendalian aset daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, BPKAD memerlukan dukungan aparatur yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai.

Namun demikian, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa kualitas sumber daya aparatur yang bertugas sebagai pengelola barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan masih bervariasi. Dari total aparatur pengurus barang yang tersebar pada berbagai perangkat daerah, masih terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan menengah serta sebagian besar belum memiliki sertifikasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah maupun pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas pengelolaan BMD apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur.

Selain faktor kualitas aparatur, komitmen pimpinan juga merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan aset daerah. Pimpinan yang memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola aset akan

mampu mendorong terciptanya sistem pengelolaan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Sebaliknya, rendahnya perhatian pimpinan terhadap pengelolaan aset dapat menyebabkan lemahnya pengawasan serta kurang optimalnya pelaksanaan tugas pengelola barang di setiap unit kerja.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kualitas kerja aparatur daerah dan komitmen pimpinan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan.

Kualitas Kerja Aparatur

Kualitas kerja aparatur pada dasarnya merupakan elemen strategis yang sangat menentukan tingkat keberhasilan organisasi publik dalam melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Secara konseptual, kualitas kerja tidak hanya dimaknai sebagai hasil akhir dari suatu pekerjaan, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan kerja yang melibatkan kompetensi, keterampilan, sikap profesional, serta tanggung jawab individu dalam menjalankan tugasnya. Dalam perspektif administrasi publik, aparatur yang memiliki kualitas kerja tinggi akan mampu menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien, yakni mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal serta meminimalkan pemborosan.

Dalam konteks organisasi pemerintahan, kualitas kerja aparatur mencerminkan tingkat kapabilitas pegawai dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata yang sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Hal ini meliputi ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas, akurasi hasil pekerjaan, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta kepatuhan terhadap norma dan prosedur yang telah ditentukan. Dengan demikian, kualitas kerja aparatur tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kerja, tetapi juga pada konsistensi dalam menjaga mutu pelayanan publik yang berkelanjutan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi pemerintahan (Nurmasitha *et al.*, 2013). Aparatur yang memiliki kualitas kerja yang baik akan mampu menghasilkan kinerja yang optimal serta mendukung tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh. Secara konseptual, kualitas kerja dapat dipahami sebagai tingkat kemampuan individu dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan memanfaatkan kompetensi, keterampilan, serta pengalaman yang dimiliki. Kualitas kerja tidak hanya berkaitan dengan hasil pekerjaan yang dicapai, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan tugas yang dilakukan secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Aparatur yang memiliki kualitas kerja tinggi biasanya mampu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, menghasilkan output yang akurat, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan organisasi (Rahmadhani & Ariani, 2022).

Dalam organisasi sektor publik, kualitas kerja aparatur sangat berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Aparatur yang memiliki kemampuan teknis, pemahaman terhadap tugas, serta komitmen terhadap pekerjaan akan lebih mampu menjalankan fungsi administrasi pemerintahan secara efektif (Kasmardin *et al.*, 2023). Oleh karena itu, peningkatan kualitas kerja aparatur seringkali menjadi fokus utama dalam upaya reformasi birokrasi, terutama untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kualitas kerja aparatur juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan individu, pengalaman kerja, keterampilan profesional, serta sikap kerja yang dimiliki pegawai. Aparatur yang memiliki potensi dan kemampuan yang baik cenderung mampu menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan tepat. Di samping itu, tingkat profesionalisme dalam bekerja juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kerja aparatur, karena profesionalisme mencerminkan sikap tanggung jawab, integritas, serta komitmen dalam menjalankan tugas organisasi. Dengan demikian, kualitas kerja aparatur dapat dipahami sebagai kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas secara efektif dan profesional sehingga mampu menghasilkan kinerja yang optimal bagi organisasi. Tingginya kualitas kerja aparatur akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan organisasi, termasuk dalam pengelolaan aset atau barang milik daerah (Firmansyah & Hollyson, 2021).

Komitmen Pemimpin

Komitmen pimpinan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dan pengelolaan organisasi. Dalam konteks organisasi pemerintahan, komitmen pimpinan menunjukkan tingkat keseriusan, tanggung jawab, serta keterlibatan pimpinan dalam mendorong tercapainya tujuan organisasi. Pimpinan yang memiliki komitmen tinggi akan berperan aktif dalam mengarahkan, mengawasi, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program organisasi dilaksanakan secara optimal. Secara teoritis, komitmen pimpinan dapat diartikan sebagai kesediaan dan kesungguhan seorang pemimpin untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan organisasi, termasuk dalam pengambilan keputusan, pengalokasian sumber daya, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai. Komitmen tersebut tercermin dari konsistensi pimpinan dalam menerapkan kebijakan, memberikan teladan kepada bawahan, serta mendorong

terciptanya lingkungan kerja yang kondusif bagi pencapaian tujuan organisasi (Yanti & Putri, 2023). Dalam organisasi sektor publik, komitmen pimpinan memiliki peranan yang sangat strategis karena pimpinan merupakan aktor utama yang menentukan arah kebijakan organisasi. Pimpinan yang memiliki komitmen kuat akan mampu menciptakan sistem kerja yang terarah, meningkatkan motivasi pegawai, serta memastikan bahwa setiap kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya komitmen pimpinan dapat menyebabkan lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi, serta tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan organisasi.

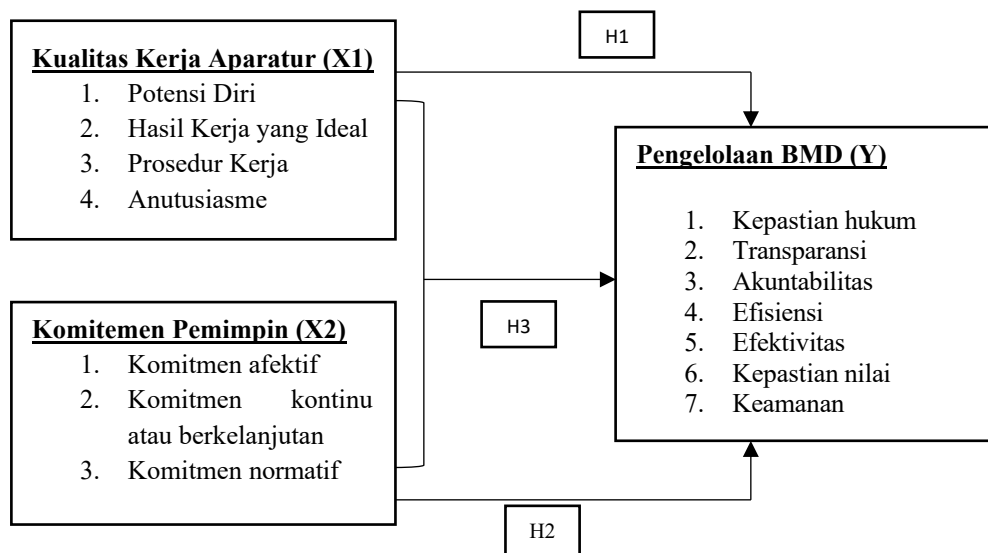
Komitmen pimpinan juga berkaitan erat dengan integritas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki komitmen tinggi biasanya menunjukkan kepedulian terhadap keberhasilan organisasi, bersedia mengambil tanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, serta mampu memberikan dukungan kepada pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, keberadaan pimpinan yang berkomitmen kuat menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, komitmen pimpinan dapat dipahami sebagai tingkat kesungguhan dan tanggung jawab pemimpin dalam mendukung pelaksanaan kebijakan organisasi serta mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Barusman *et al.*, 2019).

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan elemen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam perspektif administrasi publik, BMD tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aset fisik semata, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi yang harus dikelola secara profesional melalui proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengawasan dan pengendalian. Barang milik daerah mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan aset tersebut memiliki peran yang sangat vital, karena tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan BMD yang baik menuntut adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pemanfaatan agar dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan (Nohi, 2025). Pengelolaan barang milik daerah pada dasarnya merupakan suatu proses manajerial yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, hingga pada tahap penghapusan aset. Setiap tahapan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung fungsi strategis dalam memastikan bahwa seluruh aset daerah dapat memberikan nilai guna dan nilai tambah secara optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam perspektif manajemen aset publik, pengelolaan yang efektif menuntut adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terkoordinasi, serta pengawasan yang berkelanjutan. Agar pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Pengelolaan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur akan memudahkan proses pengendalian serta meminimalisasi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan aset. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan aset daerah tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi pemerintah, tetapi juga mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Pengelolaan barang milik daerah harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat dikelola secara tertib administrasi, terlindungi secara hukum, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pengelolaan aset daerah yang baik juga sangat berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Aset yang dikelola secara optimal dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah serta meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Sebaliknya, pengelolaan aset yang tidak tertib dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kehilangan aset, penyalahgunaan, serta ketidaksesuaian pencatatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah (Novita, 2025).

Pengelolaan barang milik daerah memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta komitmen pimpinan yang kuat agar proses pengelolaan aset dapat berjalan secara efektif. Aparatur yang memiliki kualitas kerja tinggi serta pimpinan yang memiliki komitmen kuat akan mampu memastikan bahwa pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan aset yang baik. Dengan demikian, pengelolaan barang milik daerah dapat dipahami sebagai proses pengelolaan aset pemerintah daerah secara sistematis, transparan, dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Ismunandar & Lestari, 2019).

Kerangka Pikir**Gambar 1. Kerangka Pemikiran****Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis secara empiris hubungan antara kualitas kerja aparatur dan komitmen pimpinan terhadap efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah. Pendekatan kuantitatif dipilih karena berlandaskan pada paradigma positivistik yang menekankan pada pengukuran variabel secara objektif melalui data berbentuk angka, sehingga memungkinkan dilakukannya pengujian hipotesis secara sistematis menggunakan teknik analisis statistik. Dalam konteks ini, kualitas kerja aparatur dipandang sebagai representasi dari kompetensi, ketelitian, dan produktivitas pegawai, sedangkan komitmen pimpinan mencerminkan tingkat kesungguhan, konsistensi, serta tanggung jawab dalam mengarahkan dan mengendalikan proses pengelolaan aset daerah agar berjalan secara optimal, transparan, dan akuntabel.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan asosiatif. Pendekatan deskriptif dimanfaatkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual kualitas kerja aparatur, tingkat komitmen pimpinan, serta praktik pengelolaan Barang Milik Daerah pada organisasi perangkat daerah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, karakteristik, dan kecenderungan yang terjadi di lapangan. Sementara itu, pendekatan asosiatif digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian secara lebih mendalam, sehingga dapat diketahui sejauh mana variabel independen, yaitu kualitas kerja aparatur dan komitmen pimpinan, memberikan kontribusi terhadap variabel dependen berupa pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan yang berbasis data dan bukti empiris.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aparatur yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan, dengan total sebanyak 92 orang. Dalam konteks metodologi penelitian, populasi merupakan keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga keberadaannya menjadi sumber utama dalam memperoleh data yang representatif dan akurat. Mengingat jumlah populasi yang relatif terbatas dan masih memungkinkan untuk dijangkau secara keseluruhan, penelitian ini menerapkan teknik sampling jenuh atau yang dikenal juga sebagai sensus. Teknik ini merupakan metode penarikan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden, sehingga tidak ada pengambilan sebagian dari populasi. Penggunaan sampling jenuh bertujuan untuk meminimalkan kesalahan pengambilan sampel (sampling error) serta meningkatkan tingkat keakuratan dan validitas hasil penelitian, karena data diperoleh langsung dari seluruh elemen populasi yang menjadi objek kajian. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya secara komprehensif dan mendalam (Upadhyay, 2023). Dengan menggunakan teknik ini, data yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya secara lebih representatif karena seluruh elemen populasi dilibatkan dalam proses penelitian.

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen meliputi kualitas kerja aparatur dan komitmen pimpinan, sedangkan variabel dependen adalah pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengukuran setiap variabel dilakukan berdasarkan indikator-indikator yang relevan dengan konsep teoritisnya. Kualitas kerja aparatur diukur melalui indikator potensi diri, optimalisasi hasil kerja, proses pelaksanaan pekerjaan, serta semangat kerja. Komitmen pimpinan diukur melalui dimensi komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Adapun pengelolaan Barang Milik Daerah diukur berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan aset daerah yang mencakup kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepastian nilai, serta keamanan aset. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert dengan lima tingkat penilaian yang menggambarkan tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan dalam kuesioner penelitian. Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang keduanya berperan penting dalam mendukung keabsahan serta kelengkapan hasil penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi dengan responden, yaitu aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Daerah pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner yang disusun secara sistematis berdasarkan indikator variabel penelitian. Penyusunan kuesioner yang terstruktur ini bertujuan agar data yang diperoleh mampu menggambarkan kondisi empiris secara aktual, serta mencerminkan persepsi, sikap, dan pengalaman responden secara objektif dan terukur sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung, seperti dokumen resmi pemerintah, laporan instansi terkait, arsip administrasi, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data ini berfungsi untuk memperkuat landasan teoritis sekaligus memberikan konteks yang lebih luas terhadap fenomena yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi penyebaran kuesioner dan studi dokumentasi, yang secara terpadu bertujuan menghasilkan informasi yang komprehensif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait variabel-variabel dalam penelitian.

Sebelum memasuki tahap analisis data, instrumen penelitian harus terlebih dahulu melalui pengujian kualitas alat ukur yang mencakup uji validitas dan reliabilitas. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mampu merepresentasikan konstruk atau variabel yang diteliti secara tepat serta menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Secara teoritis, validitas mengacu pada tingkat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur konsep yang seharusnya diukur, sehingga hasil pengukuran dapat menggambarkan kondisi empiris yang sebenarnya di lapangan.

Uji validitas umumnya dilaksanakan dengan cara mengkaji hubungan antara skor masing-masing item pernyataan dengan skor total variabel menggunakan teknik korelasi. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui sejauh mana setiap butir pernyataan memiliki kontribusi yang signifikan dalam merefleksikan variabel yang diteliti. Sementara itu, reliabilitas berkaitan dengan tingkat konsistensi dan kestabilan hasil pengukuran apabila instrumen digunakan berulang kali dalam kondisi yang relatif sama. Instrumen yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi akan menghasilkan data yang cenderung konsisten dan tidak mudah dipengaruhi oleh faktor kebetulan, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Pengujian reliabilitas biasanya dilakukan dengan menggunakan koefisien tertentu, seperti Cronbach Alpha, untuk menilai konsistensi internal antar item dalam suatu variabel. Apabila instrumen telah memenuhi kriteria valid dan reliabel, maka data yang diperoleh dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Tahap berikutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan statistik inferensial, yang bertujuan untuk menguji serta menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel kualitas kerja aparatur dan komitmen pimpinan terhadap efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang bersifat generalisasi.

Hasil dan Pembahasan

Uji Instrumen Penelitian

Tabel 1. Hasil Uji Instrumen Penelitian

Variabel	Item pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Alpha Cronbach</i>	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>
Kualitas Kerja Aparatur X ₁	1	0,312	0,203	0,778
	2	0,581		0,736
	3	0,226		0,793
	4	0,476		0,754
	5	0,680		0,720

	6	0,504		0,749
	7	0,465		0,755
	8	0,636		0,724
Komitmen Pimpinan X ₂	1	0,742	0,203	0,891
	2	0,748		0,891
	3	0,642		0,899
	4	0,741		0,892
	5	0,555		0,907
	6	0,760		0,890
	7	0,818		0,887
	8	0,755		0,891
	9	0,419		0,913
Pengelolaan BMD Y	1	0,645	0,203	0,967
	2	0,790		0,964
	3	0,818		0,964
	4	0,751		0,965
	5	0,840		0,963
	6	0,881		0,965
	7	0,782		0,963
	8	0,881		0,965
	9	0,757		0,963
	10	0,852		0,965
	11	0,881		0,963
	12	0,761		0,965
	13	0,853		0,963
	14	0,840		0,963

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel, nilai Corrected Item–Total Correlation dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur untuk menilai kemampuan setiap butir pernyataan dalam merepresentasikan konstruk variabel yang diteliti. Secara konseptual, uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mampu mengukur konsep yang seharusnya diukur, sehingga tingkat ketepatan dan akurasi data dapat terjamin. Dalam penelitian ini, seluruh nilai korelasi item menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,203 pada jumlah responden sebanyak 92 orang, yang menandakan bahwa setiap item memiliki keterkaitan yang kuat dengan skor total variabelnya.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa seluruh butir pernyataan yang digunakan telah memenuhi kriteria validitas, karena mampu mencerminkan variabel yang diukur secara tepat. Hal ini memperkuat bahwa instrumen yang digunakan telah sesuai dengan kaidah pengukuran dalam penelitian kuantitatif, di mana setiap indikator harus memiliki hubungan yang signifikan dengan konstruk yang dibentuk. Dengan demikian, instrumen penelitian dapat dikatakan memiliki tingkat validitas yang baik dan layak digunakan dalam proses pengumpulan data.

Selain itu, hasil pengujian reliabilitas yang ditunjukkan melalui nilai Cronbach’s Alpha memperlihatkan bahwa seluruh variabel memiliki koefisien di atas batas minimum yang dipersyaratkan, yaitu sebesar 0,60. Secara teoritis, reliabilitas berkaitan dengan tingkat konsistensi dan kestabilan suatu instrumen dalam mengukur fenomena yang sama secara berulang. Nilai Cronbach’s Alpha yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat keandalan yang baik, sehingga mampu menghasilkan data yang konsisten. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini tidak hanya valid secara konstruk, tetapi juga reliabel, sehingga dapat dipercaya dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian.

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,96767145
Most Extreme Differences	Absolute	,120
	Positive	,120
	Negative	-,064
Test Statistic		,120
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil pengujian asumsi normalitas data dengan menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada bagian Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut merepresentasikan probabilitas yang digunakan untuk menilai apakah distribusi data sampel menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Pengujian ini merupakan salah satu prosedur statistik yang umum digunakan untuk memastikan kelayakan data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Secara teoritis, dalam statistik inferensial, suatu data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (p-value) lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu $\alpha = 0,05$. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara distribusi data empiris dengan distribusi normal teoretis. Dengan demikian, hasil pengujian yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 menguatkan bahwa data tidak mengalami penyimpangan dari asumsi normalitas.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Pemenuhan asumsi ini menjadi sangat penting karena merupakan salah satu prasyarat dalam penggunaan analisis statistik parametrik. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, maka analisis yang dilakukan dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat, valid, dan dapat dipercaya dalam menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti.

Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,129	4,777		,655	,514
	Kualitas Kerja Aparatur (X ₁)	1,272	,236	,585	5,394	,000
	Komitmen Pimpinan (X ₂)	,413	,189	,237	2,189	,031

a. Dependent Variable: Pengelolaan BMD (Y)

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan model $Y = 3,129 + 1,272X_1 + 0,413X_2$. Interpretasi dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 3,129 menunjukkan bahwa apabila variabel kualitas kerja aparatur (X₁) dan komitmen pimpinan (X₂) berada pada kondisi tetap atau bernilai nol, maka tingkat pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tetap berada pada nilai 3,129.

2. Koefisien regresi kualitas kerja aparatur (X_1) sebesar 1,272 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kualitas kerja aparatur sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan pengelolaan BMD sebesar 1,272 poin, dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.
3. Koefisien regresi komitmen pimpinan (X_2) sebesar 0,413 menunjukkan bahwa peningkatan komitmen pimpinan sebesar 1% akan meningkatkan pengelolaan BMD sebesar 0,413 poin, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
4. Nilai koefisien kualitas kerja aparatur (1,272) lebih besar dibandingkan koefisien komitmen pimpinan (0,413), sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja aparatur merupakan variabel yang lebih dominan dalam mempengaruhi pengelolaan Barang Milik Daerah.

Uji t-statistik (parsial)

Uji Hipotesis Pengaruh Kualitas Kerja Aparatur (X_1) terhadap Pengelolaan BMD (Y)

Hasil pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas kerja aparatur terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menunjukkan temuan yang signifikan secara statistik. Secara konseptual, kualitas kerja aparatur mencerminkan tingkat kemampuan, ketelitian, tanggung jawab, serta profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi dan teknis, termasuk dalam pengelolaan aset daerah yang menuntun akurasi, akuntabilitas, dan transparansi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t, diperoleh nilai t-hitung sebesar 5,394 pada taraf signifikansi 0,05. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 1,986 pada jumlah sampel (n) sebanyak 92. Perbandingan ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel ($5,394 > 1,986$), sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas kerja aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BMD. Artinya, semakin tinggi kualitas kerja yang dimiliki oleh aparatur, maka semakin baik pula proses pengelolaan aset daerah yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, hingga pengawasan. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan prinsip manajemen publik yang menekankan pentingnya sumber daya manusia yang kompeten sebagai faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, peningkatan kualitas kerja aparatur melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penguatan integritas menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif dan efisien.

Uji Hipotesis Pengaruh Komitmen Pimpinan (X_2) terhadap Pengelolaan BMD (Y)

Hasil pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen pimpinan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menunjukkan adanya hubungan yang bermakna secara statistik. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,189 pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 1,986 pada jumlah sampel (n) sebanyak 92, sehingga secara empiris dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen pimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BMD. Komitmen pimpinan mencerminkan tingkat kesungguhan, tanggung jawab, dan konsistensi pemimpin dalam menjalankan fungsi manajerial, termasuk dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan aset daerah. Tingginya komitmen pimpinan akan mendorong terciptanya tata kelola BMD yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, karena pimpinan berperan sebagai pengarah kebijakan sekaligus pengendali dalam setiap proses pengelolaan aset. Selain itu, komitmen yang kuat dari pimpinan juga mampu meningkatkan kedisiplinan aparatur serta memastikan bahwa pengelolaan BMD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat komitmen pimpinan, maka semakin optimal pula kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan.

Uji Hipotesis Pengaruh Kualitas Kerja Aparatur (X_1) dan Komitmen Pimpinan (X_2) terhadap Pengelolaan BMD (Y)

Pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan uji F (simultan), yaitu dengan membandingkan nilai F-hitung yang diperoleh dari hasil analisis regresi dengan nilai F-tabel sebagai dasar dalam pengambilan keputusan statistik. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang dibangun memenuhi kriteria signifikansi secara keseluruhan. Dengan kata lain, pengujian ini tidak hanya menilai masing-masing variabel secara terpisah, tetapi juga mengevaluasi kekuatan model dalam menjelaskan hubungan antar variabel secara komprehensif. Secara teoritis, uji F memiliki peran penting dalam analisis regresi karena digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa suatu model penelitian dikatakan baik apabila variabel-variabel bebas yang dimasukkan mampu secara bersama-sama memberikan kontribusi nyata dalam menjelaskan variasi variabel

terikat. Oleh karena itu, uji F menjadi indikator utama dalam menilai kelayakan model serta relevansi variabel yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai F-hitung yang lebih besar dibandingkan dengan nilai F-tabel. Temuan ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat kelayakan yang baik serta mampu menjelaskan hubungan antar variabel secara signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang diteliti secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima.

Selain itu, pengujian hipotesis juga didukung oleh pendekatan nilai signifikansi (α) yang dalam penelitian sosial umumnya ditetapkan sebesar 0,05 sebagai batas toleransi kesalahan. Apabila nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif dinyatakan diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil penelitian, nilai signifikansi berada di bawah ambang batas tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas kerja aparatur dan komitmen pimpinan secara simultan berpengaruh nyata terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Secara teoritis, temuan ini memperkuat pandangan dalam kajian manajemen publik yang menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan aset daerah tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia serta komitmen kepemimpinan. Kualitas aparatur mencerminkan tingkat kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas, sedangkan komitmen pimpinan berkaitan dengan kesungguhan dalam mengarahkan, mengawasi, serta memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif. Dengan adanya sinergi antara kedua aspek tersebut, pengelolaan BMD diharapkan dapat berlangsung secara optimal, transparan, dan akuntabel.

Uji f-statistik (simultan)

Tabel 4. Hasil uji f-statistik (simultan)

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3670,237	2	1835,118	72,729	,000 ^b
	Residual	2245,676	89	25,232		
	Total	5915,913	91			

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai Fhitung sebesar 72,729 dengan tingkat signifikansi 0,000 pada taraf kepercayaan 5%, serta derajat kebebasan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 89$. Nilai Fhitung yang lebih besar dari Ftabel (3,10) menunjukkan bahwa kualitas kerja aparatur dan komitmen pimpinan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BMD.

Pembahasan

Faktor Budaya Bepengaruh Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk benih jagung NK di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara. Mayoritas dari 88 responden menilai faktor budaya pada kategori sedang hingga baik, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat turut memengaruhi keputusan pembelian. Analisis regresi menunjukkan kontribusi faktor budaya sebesar 28,8% dengan hubungan yang sangat kuat ($r = 0,909$). Hasil uji t juga menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan signifikansi $<0,05$, sehingga hipotesis diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pemasaran perlu mempertimbangkan nilai budaya lokal, seperti tradisi, norma sosial, serta penggunaan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Faktor Sosial Berpengaruh Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian benih jagung NK di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara. Sebagian besar responden memberikan penilaian pada kategori baik dan sedang, yang menandakan bahwa lingkungan sosial, seperti kelompok referensi dan hubungan masyarakat, berperan dalam menentukan keputusan pembelian. Hasil analisis regresi menunjukkan kontribusi sebesar 15,5% dengan korelasi yang sangat kuat ($r = 0,926$). Uji t juga membuktikan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan signifikansi $<0,05$ sehingga hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran perlu memanfaatkan jaringan sosial, tokoh masyarakat, serta media sosial untuk memperkuat pengaruh terhadap konsumen.

Faktor Pribadi Berpengaruh Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian

Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor pribadi memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk benih jagung NK di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara. Mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori sedang dan sangat baik, yang menunjukkan bahwa karakteristik individu seperti preferensi, kebutuhan, dan kondisi ekonomi memengaruhi keputusan pembelian. Analisis regresi menunjukkan kontribusi terbesar yaitu 50,6% dengan korelasi yang sangat kuat ($r = 0,943$). Uji t juga menunjukkan nilai signifikansi $<0,05$ sehingga hipotesis diterima. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi pemasaran yang mempertimbangkan karakteristik pribadi konsumen melalui segmentasi pasar, personalisasi promosi, serta peningkatan kualitas pelayanan.

Faktor Psikologis Berpengaruh Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor psikologis berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian benih jagung NK di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara. Sebagian besar responden memberikan penilaian baik dan sedang terhadap faktor psikologis, yang menunjukkan bahwa persepsi, motivasi, dan sikap konsumen memengaruhi keputusan pembelian. Analisis regresi menunjukkan kontribusi sebesar 26,6% dengan korelasi kuat sebesar 0,899. Hasil uji t juga menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan signifikansi $<0,05$ sehingga hipotesis diterima. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi pemasaran yang mampu membangun persepsi positif, citra merek yang baik, serta pengalaman konsumen yang memuaskan.

Faktor Budaya, Sosial, Pribadi dan Psikologis Secara Bersama-sama Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian

Berdasarkan hasil pengujian simultan melalui uji F, dapat disimpulkan bahwa variabel budaya, sosial, pribadi, dan psikologis secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk benih jagung NK di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung yang secara statistik lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel, serta tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah batas $\alpha = 0,05$. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep perilaku konsumen yang menyatakan bahwa keputusan pembelian merupakan hasil interaksi kompleks dari berbagai faktor internal dan eksternal, di mana faktor budaya mencerminkan nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut masyarakat; faktor sosial berkaitan dengan pengaruh kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial; faktor pribadi meliputi karakteristik individu seperti usia, pekerjaan, dan kondisi ekonomi; sedangkan faktor psikologis mencakup motivasi, persepsi, pembelajaran, serta sikap konsumen.

Nilai koefisien determinasi sebesar 90,8% menunjukkan bahwa variabel budaya, sosial, pribadi, dan psikologis secara bersama-sama mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam keputusan pembelian konsumen. Hal ini mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki tingkat kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, masih terdapat 9,2% variasi keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti, seperti kualitas produk, harga, sistem distribusi, serta kegiatan promosi yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut, perusahaan perlu merancang strategi pemasaran yang komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi perilaku konsumen. Pendekatan yang mempertimbangkan aspek budaya, sosial, pribadi, dan psikologis secara simultan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran, sehingga mampu mendorong konsumen dalam mengambil keputusan pembelian secara lebih optimal serta meningkatkan daya saing perusahaan di pasar.

Penutup

Kesimpulan

1. Kualitas kerja aparatur terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Komitmen pimpinan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Secara bersama-sama, kualitas kerja aparatur dan komitmen pimpinan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah di BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

Implikasi

1. Pemerintah daerah, khususnya BPKAD Kabupaten Lampung Selatan, perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur melalui pelatihan, workshop, serta program pengembangan kapasitas secara berkelanjutan. Selain itu, perlu dibangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas agar pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Pimpinan BPKAD Kabupaten Lampung Selatan diharapkan memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan pengelolaan BMD yang transparan dan akuntabel. Hal ini perlu didukung oleh kebijakan yang jelas serta penerapan sistem pengawasan yang efektif guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah.
3. Diperlukan strategi manajerial yang mampu mengintegrasikan peran aparatur dan pimpinan dalam perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan BMD. Selain itu, penguatan koordinasi dan komunikasi antarbidang di BPKAD Kabupaten Lampung Selatan menjadi faktor penting untuk mewujudkan pengelolaan BMD yang lebih optimal, efektif, dan efisien.

Implikasi

1. Penguatan Strategi Pemasaran Berbasis Budaya
Perusahaan dapat menerapkan strategi pemasaran yang menekankan nilai-nilai budaya lokal, seperti menyesuaikan citra merek dengan tradisi serta preferensi masyarakat dan memasukkan unsur budaya dalam komunikasi pemasaran.
2. Peningkatan Hubungan dengan Komunitas Lokal
Perusahaan perlu memperkuat keterlibatan dengan masyarakat melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan lokal, misalnya dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya setempat.
3. Penerapan Strategi Pemasaran yang Lebih Personal
Dengan mempertimbangkan faktor pribadi dan psikologis konsumen, perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar serta menggunakan pendekatan pemasaran yang lebih personal untuk memengaruhi keputusan pembelian.
4. Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial
Perusahaan dapat memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar, berinteraksi dengan konsumen, serta membangun komunitas daring guna meningkatkan kesadaran merek.
5. Pengembangan Layanan Pelanggan yang Lebih Personal
Karena faktor pribadi berpengaruh pada keputusan pembelian, perusahaan disarankan meningkatkan kualitas layanan pelanggan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing konsumen.

Daftar Pustaka

- Barusman, A. R. P., Rulian, E. P., & Susanto, S. (2019). The Antecedent of Customer Satisfaction and Its Impact on Customer Retention in Tourism as Hospitality Industry. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(8s), 322–330.
- Belo, B. R., & Asnawai, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada OPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(2), 1–33. www.palu.bpk.go.id
- Firmansyah, A., & Hollyson, R. (2021). Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Bagaimana Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia. *EKOMBIS Sains*, 06(02), 177–193.
- Ishak, S., Koniyo, M. H., & Pakaya, N. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Sistem Informasi dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Skripsi dan Kerja Praktek (SISKP)

- Jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. *Diffusion: Journal of System and Information Techneology*, 2(1).
- Ismunandar, I., & Lestari, Y. A. (2019). Pengaruh Faktor Budaya Terhadap Keputusan Pembelian LO'I ME'E mbojo di Kota Bima. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 5(2), 101–111.
- Kasmardin, K., Rahayu, S., & Gowon, M. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara Pada UIN Sultan Thaha Sifuddin Jambil. *Urnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 8(3), 205–223. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i3.36367>
- Nohi, S. (2025). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Sistem Informasi Daerah BMD dan Komitmen Pimpinan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pohowato. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 09(02), 171–186.
- Novita, D. D. (2025). PengaruhGaya Kepemimpinan Transformasional dan Beban kerja terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus di Bidang Panatausahaan, Pemanfaatan dan Pemindahtangan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya). *Seminar Nasional Manajemen Dan Call for Papers*, 10(1), 165–178.
- Nurmasitha, F., Hakim, A., & Prsetyo, W. Y. (2013). Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Lingkungan Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1220–1228.
- Rahmadhani, F., & Ariani, R. (2022). Kualitas Aparatur, SIMDA – BMD, Regulasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan BMD. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 291–301. <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100>
- Sayoga, S. A.-R., & Yudianto, I. (2023). Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Cimahi. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 105–124. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1916>
- Setiyadi, Y. W., & Wartini, S. (2016). Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. *Management Analysis Journal*, 5(4), 315–324. <http://maj.unnes.ac.id>
- Upadhyay, R. (2023). Role of Training and Development on Employee Performance: A Quantitative Investigation. *Psychology and Education*, 55(1), 563–571. <https://doi.org/10.48047/pne.2018.55.1.69>
- Yanti, Z., & Putri, E. R. (2023). Pengaruh Kompetensi dan Komitmen Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Moderasi pada Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pasaman. *INNOVATIVE: Journal of Social Scien Research*, 3(4), 5792–5803.